

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peta adalah gambaran suatu wilayah yang di dalamnya memuat berbagai informasi tentang wilayah tersebut. Saat ini lembaga yang melakukan koordinasi pemetaan di wilayah Indonesia adalah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKORSURTANAL). Lembaga-lembaga lain yang juga berwenang membuat peta diantaranya Badan Pertanahan Negara, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Daerah, Direktorat Topografi Angkatan Darat, dan juga lembaga swasta yang membuat peta untuk kepentingan mereka sendiri.

Peta yang digambar akan menampilkan unsur-unsur yang dapat memberikan informasi tentang kondisi lahan secara lengkap. Unsur-unsur yang ditampilkan adalah sebagai berikut:

- a. Unsur batas yang terdiri atas: batas penggunaan lahan, batas penggarapan lahan, batas kepemilikan lahan dan batas administrasi.
- b. Unsur Transportasi yang terdiri atas: jalan aspal, jalan batu, jalan tanah, jalan setapak.
- c. Unsur air yang terdiri atas: mata air, sungai, parit, saluran, danau, waduk, situ, kolam, bendungan, pintu air.
- d. Unsur bangunan yang terdiri atas: rumah, gardu, saung.
- e. Unsur sarana-prasarana yang terdiri atas: jalan, tiang listrik dan jaringan listrik, tiang telepon dan jaringan telepon, tiang pemancar/relai telepon selular.
- f. Unsur penggunaan lahan yang terdiri atas: pekarangan, kebun, sawah irigasi, sawah tadah hujan.
- g. Unsur tanaman yang terdiri atas: jenis dan letak tanaman pangan dan jenis dan letak tanaman kayu-kayuan.

Masyarakat dapat membuat peta dengan melakukan pemetaan partisipatif. Pemetaan partisipatif adalah suatu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya sekaligus akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri. Pemetaan secara partisipatif



dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan percaya diri masyarakat dalam mengidentifikasi serta menganalisis situasinya, baik potensi maupun permasalahannya. Hal ini sangat berbeda dengan pendekatan 'top-down' yang sering dipakai oleh lembaga-lembaga yang mengumpulkan informasi untuk kelancaran program mereka. Dalam program itu, lembaga menentukan apa yang akan dikerjakan dalam suatu wilayah, sementara masyarakat yang diikutkan tanpa diberikan pilihan apapun.

Secara partisipatif, justru masyarakat memanfaatkan informasi dan hasil analisis sendiri untuk mengembangkan rencana kerja mereka agar lebih maju dan mandiri. Masyarakat yang hidup dan bekerja di wilayahnya lebih memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai wilayahnya sendiri. Hal ini menjadi dasar mengapa masyarakat setempat harus melakukan dan dilibatkan dalam pemetaan wilayahnya. Masyarakat desa itu sendiri yang akan membuat peta yang lengkap mengenai sejarah desanya, serta penggunaan lahannya.

Masyarakat dapat membuat peta berdasarkan tujuan pembuatannya, baik untuk tujuan advokasi, perencanaan kawasan, konservasi, revitalisasi dan alat pengorganisasian masyarakat, dan lain sebagainya. Contoh kasusnya adalah Wilayah Nusa Ceningan Bali yang akan dibangun untuk kawasan wisata oleh *Bali Tourism Development Center*. Masyarakat telah memiliki tata ruang wilayah berdasarkan adat istiadat mereka sendiri. Setelah peta yang dimiliki dijadikan alat advokasi untuk menolak resort-resort yang akan dibangun, akhirnya rencana menjadikan wilayah tersebut sebagai objek wisata dapat dibatalkan. Contoh kasus lainnya adalah pengalaman Karst Aceh dalam kegiatan *Mapping Mobile Squad dan GIS Participatory*, khususnya di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya dan Aceh Barat.

Pada umumnya sektor pertanian mendominasi perekonomian di negara berkembang. Seperti di Indonesia Ciri pertaniannya antara lain memiliki skala usaha tani kecil, lahan sempit, modal kecil, dan keterbatasan lainnya. Pertanian di daerah relatif lebih beragam dibandingkan dengan pertanian di negara maju, yang cenderung monokultur. Namun demikian adanya beberapa keterbatasan tersebut mengakibatkan keragaman sistem usaha tani di negara berkembang.

Dalam PJP II kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pedesaan harus merupakan kebijaksanaan sentral yang perlu dipertahankan, oleh karena itu sektor pertanian tetap akan menjadi tumpuan pembangunan ekonomi dengan peningkatan kualitas dari sekedar orientasi pada usaha tani untuk mencukupi kebutuhan (*product oriented*) menjadi kegiatan-kegiatan yang berwawasan agribisnis untuk mencapai kesejahteraan wilayah pedesaan (*prosperity oriented*).

Pengetahuan mengenai sumber daya lahan telah disadari perlunya perencanaan terutama untuk pengembangan pertanian, tetapi informasi data sumber daya lahan jarang digunakan secara efektif. Hal-hal tersebut perlu ditelaah dalam usaha meningkatkan sumbangan penelitian sumber daya lahan untuk pengembangan pertanian secara berkelanjutan.

Desa Dayun yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Siak memiliki luas areal 84.000 ha. Penggunaan lahan sebagai usaha pertanian (perkebunan sawit dan karet) cukup luas yaitu 10.270 ha. lahan sawah dan perladangan 25 ha dan selebihnya merupakan daerah pemukiman dan hutan-hutan. Sampai sekarang Desa Dayun belum mempunyai peta lahan dan rencana tata ruang lahan usaha tani sebagai acuan dalam pembangunan pertanian di desa ini. Hal ini menjadi dasar pemikiran mengapa masyarakat perlu untuk membuat peta lahan mereka sendiri. Berdasarkan pemikiran di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul "*Pemetaan Partisipatif Untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Lahan Usaha Tani di Desa Dayun.*"

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Membuat peta lahan desa, dimaksudkan agar masyarakat desa secara partisipatif dapat menggambarkan tata letak unsur-unsur yang terdapat pada lahan yang ditempati dan digarapnya di atas media kertas.
2. Menyusun rencana tata ruang lahan usaha tani Desa Dayun dengan cara partisipatif.
3. Melakukan sosialisasi mengenai perencanaan ruang.